

**ABSTRACT**

*BUMD is an institution that functions to advance the regional economy in accordance with the potential that exists in the region, one of which has a source of funding from the Regional Government as a shareholder or owner of the BUMD, in addition to adding capital to run its business activities, BUMD can apply for credit at the bank's financial institutions which is followed by guarantee of BUMD assets as the implementation of the bank's prudential principle. The issuance of Government Regulation Number 54 Year 2017 concerning Regionally Owned Enterprises has brought legal consequences on BUMD assets originating from the participation of Regional Government capital. PP Number 54 Year 2017 does not apply retroactively to BUMDs who have pledged their assets before the issuance of PP Number 54 Year 2017, so the obligation to repay credit loans must still be fulfilled so that BUMD assets remain assets belonging to the Regional Government. Therefore, this thesis seeks to elaborate the implementation of collateral for BUMD assets in the form of land and / or buildings originating from the participation of Regional Government capital and the existence of guarantees for BUMD assets in the form of land and / or buildings originating from Regional Government capital inclusion, since the issuance of PP Number 54 of 2017, through the concept approach and legislation approach.*

*Key word : Regional Government's Asset, BUMD, Guarantee*

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Burgelijk Wetboek (BW), Staatblad 1847 Nomor 23*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173)